

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI¹

Oleh :

Birdie Kevien Momor²

Wiesje Wilar³

Trintje Lambey⁴

ABSTRAK

Pemilukada secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi dari manapun. Partisipasi politik merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah satu hal yang sangat mendasar dalam proses Demokrasi. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan mengkaji tentang partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Minahasa terkait bentuk dan bagaimana mereka berpartisipasi. Dalam pengumpulan data metode yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2018 di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa masyarakat begitu antusias dalam menyaksikan pesta demokrasi tersebut tidak terkecuali dari kalangan pemilih pemula. Pemilih pemula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga mempunyai bagian yang penting dalam suksesnya pemilukada secara langsung. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh para pemilih pemula tidak berbeda dengan aktivitas masyarakat yang lain seperti terlibat dalam kampanye, diskusi politik, hingga pemberian suara.

Kata Kunci : Partisipasi Politik; Pemilih Pemula; Pemilihan Kepala Daerah.

ABSTRACT

The Pemilukada is directly the realization of the return of basic rights of the people in choosing regional leaders directly, freely and confidentially without intervention from anywhere. Political participation as a manifestation of the implementation of popular sovereignty is a very basic thing in the process of Democracy. This research will identify and examine the political participation of

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

³ Staf pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan program studi ilmu politik, FISIP UNSRAT, selaku Pembimbing 1

⁴ Staf pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan program studi ilmu politik, FISIP UNSRAT, selaku pembimbing 2

the novice voters in Minahasa District regarding the shape and how they participated. In data collection methods carried out through interviews, observation, documentation. From the results of the study it was found that the General Election of Regional Heads in 2018 in the East Langowan District of the District of Minahasa was so enthusiastic in the success of the democratic party, no exception among the beginner voters. Beginner voters as an inseparable part of society also have an important part in the success of direct post-conflict local elections. The forms of political participation carried out by novice voters are no different from other people's activities such as being involved in campaigns, political discussions, and voting.

Keywords: Political Participation; Elector Voter; Election of Regional Heads.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

Demokrasi merupakan salah satu parameter yang menjadikan Negara itu kuat dengan memposisikan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam setiap kehidupannya dalam bermasyarakat dan bernegara.

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun Daerah.

Salah satu syarat berjalannya demokrasi adalah dengan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas. Penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, didalamnya disebutkan pasal 1 ayat (1) bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan sarana pengalaman demokrasi, dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan akan tetapi hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara

adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah.

Perwujudan demokrasi di tingkat lokal salah satunya adalah dengan melaksanakan pemilukada di daerah-daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan wakil Bupati/wakil Walikota.

Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, didalamnya disebutkan pada pasal 7 ayat 1 bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Pemilukada secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi dari manapun.

Di era reformasi, partisipasi politik memegang peranan penting dalam terselenggaranya Pemerintah dan demokrasi baik di Pusat maupun di Daerah. Partisipasi politik secara umum merupakan kegiatan Warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai Warga Negara.

Partisipasi politik merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah satu hal yang sangat mendasar dalam proses Demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktek Demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik.

Sebagaimana Pesta demokrasi (pemilukada) di Kabupaten Minahasa, yang dimana akan adanya persaingan antara para calon, dengan menyiapkan cara untuk bisa menarik hati dari masyarakat sesuai dengan kreatifitas masing-masing calon. Banyak cara untuk bisa membuat masyarakat bisa merasa simpati kepada para calon, yaitu dengan adanya berkampanye, menghadiri setiap acara yang dibuat oleh masyarakat dan memasang Baliho/spanduk.

Dari beberapa calon mempersiapkan berbagai cara untuk bersaing memperebutkan suara dari para pemilih yang ada di Daerah Kabupaten Minahasa. Dan masyarakatpun semakin sulit untuk bisa menentukan pilihan mereka, masyarakat pun melihat sosok kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati lewat wibawa mereka untuk memimpin. Terutama bagi pemilih pemula yang tergolong remaja yang berusia 17 tahun atau lebih, yang sudah/perna menikah yang mempunyai hak untuk memilih. Karena itu setiap calon Bupati dan Wakil Bupati berkunjung ke setiap tempat yang menjadi wilayah Kabupaten, agar

dapat berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung dan bisa dikenal oleh masyarakat.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini, tak jarang juga didapati banyak pemilih yang mendapatkan bingkisan, uang, sembako, dan lain sebagainya (yang sebenarnya tidak diperbolehkan) dari tim sukses para kandidat calon Bupati, dengan maksud untuk bisa menarik simpati dari masyarakat untuk bisa mendapatkan suara yang banyak dalam Pilkada terutama bagi para pemilih pemula.

Pemilih pemula dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Pemilih pemula adalah orang yang memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, yang di sebut pemilih pemula ini adalah yang berusia (17 - 21 tahun), atau yang belum sama sekali memilih dalam pemilihan umum, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, karena mereka belum memiliki pengalaman voting pada pemilu sebelumnya, namun bukan berarti mereka tidak dapat mencerminkan aspirasi mereka dalam bidang politik, tetapi mereka tetap melaksanakan hak pilih mereka di tempat pemilihan.

Partisipasi politik pemilih pemula yang saat ini sangat menarik untuk diamati, karena kita ketahui bersama bahwa pemilih pemula adalah objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan ke arah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik.

Semua masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan tepat termasuk didalamnya pemilih pemula. Oleh karena itu kegiatan politik bagi pemilih pemula menjadi penting karena kegiatan ini bukan hanya pada soal mencoblos tanda atau gambar dari pasangan calon namun kesadaran dan pendewasaan politik yang perlu ditumbuhkan sejak awal melalui sosialisasi politik.

Keberadaan pemilih pemula terkadang menjadi penyebab kurangnya partisipasi politik karena melihat realita yang terjadi sebagian besar pemilih pemula belum mengetahui proses politik, bingung menentukan pilihan, ketidaktahuan mereka terhadap partai politik, visi misi partai politik dan kesadaran untuk menggunakan hak pilih masih rendah.

Dilihat dari tingkat kesadaran para pemilih pemula dalam pilkada, menunjukkan perbedaan yang didasarkan pada kurangnya pengalaman dan pemahaman belajar berpolitik, yang masih terbelah dengan kelompok apatis, apolitis, dan kritis terhadap pemilu. Adapun pemilih pemula yang menggunakan hak pilih mereka untuk berpartisipasi lewat pesta Demokrasi, selain itu beberapa faktor yang mempengaruhi pemilih pemula menggunakan hak pilihnya karena sebagian dari pemilih pemula memiliki harapan yang besar dan menaruh kepercayaan kepada pemerintah untuk memajukan bangsa akan tetapi ada juga hanya sekedar ikut-ikutan, memilih hanya sekedar faktor popularitas. Karena dari cara mereka melihat hal ini masih belum terbiasa dikarenakan ada

begitu banyak pengaruh-pengaruh mulai dari kalangan keluarga, kerabat yang ada dilingkungan sekitarnya, sehingga berpengaruh dalam mereka mengambil keputusan dalam memilih calon Bupati dan Wakil Bupati. Adapun pemilih pemula ini melihat cara pendekatan dari pada kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati dengan berpolitik uang (*money politik*). Adapun mereka dipaksa/dibujuk dengan honor yang besar, pendidikan dan kesehatan gratis. Lewat pemilukada ini dapat dilihat bagaimana partisipasi politik para pemilih pemula untuk menggunakan hak suara dalam menyukseskan pemilihan umum di Kabupaten Minahasa.

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa telah dilaksanakan pada tanggal 27 juni 2018, sesuai dengan hasil perolehan suara yang di dapat sebesar 251.141, di antaranya 126.719 adalah pemilih laki-laki, dan 124.422 adalah pemilih perempuan. Yang dimana terdapat Pemilih pemula sebanyak 6.572 jiwa, yang didalamnya pemilih perempuan 3.294, dan pemilih laki-laki 3.278 yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).

Kecamatan Langowan Timur adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa, yang terdiri dari 8 desa dan yang memiliki jumlah pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 10.129, dan memiliki jumlah pemilih pemula sebanyak 247 jiwa, yang diantaranya pemilih perempuan 128, dan pemilih laki-laki 119 yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).

Kecamatan Langowan Timur pada waktu pemilihan memiliki perolehan suara sesuai Nomor urut, dengan Nomor urut 1 memiliki jumlah 2.538 suara, sedangkan Nomor urut 2 memiliki jumlah 5.257 suara, jadi pada pemilihan di Kecamatan Langowan Timur di menangkan oleh pasangan calon Nomor urut 2, yaitu Royke Octavian Roring dan Robby Dondokambey.

Hasil perolehan suara berdasarkan penghitungan yang diperoleh oleh kedua Calon yaitu dengan Nomor urut 1 Ivan Steven Sarundajang dan Careig Naichel Runtu, 70.900 suara/ (35,59%), dan dengan Nomor urut 2 Ir. Royke Octavian Roring dan Robby Dondokambey, 132.152 suara/ (64,41%). Jadi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa yang telah dilaksanakan pada Tanggal 27 juni Tahun 2018 di menangkan oleh pasangan Calon Nomor urut 2 yaitu Royke O. Roring dan Robby Dondokambey.

Dan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa 2018. Dari kedua calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut terdapat beberapa partai pendukung atau pengusung. Yaitu dari Calon Nomor Urut 1 ada partai Golkar, NASDEM dan PKPI. Dan Calon Nomor Urut 2 yaitu partai PDIP, Gerindra, Demokrat dan Hanura.

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting Demokrasi. Asumsi yang mendasari Demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang

baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Akan tetapi, keputusan politik menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Menurut Miriam Budiardjo (Anwar Arifin 2015:78) mengatakan bahwa partisipasi politik secara Umum dapat didefinisi sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin Negara, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan public (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Selanjutnya Menurut Samuel P. Huntington dan Johan M. Nelson (Miriam Budiardjo 2008: 368) partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Menurut Tami Legowo (Sitepu 2012:93) partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari warga Negara yang secara sengaja maupun tidak sengaja yang berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan system politik atau pemerintah. Dalam hal ini dapat dilakukan baik secara individual maupun secara berkelompok, secara spontan maupun dimobilisasi legal maupun ilegal sifatnya.

Selanjutnya Hebert McClosky (Sinaga 2013:52) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dengan melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan-kebijakan umum.

Oleh sebab itu, di Negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi politik masyarakat lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasi tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga Negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo 2008: 369).

Mengacu pada pendapat para ahli diatas maka penulis berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat didalam Negaranya yang ikut melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas politik maupun Pemerintahan yang ada didalam Negaranya.

2. Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik ini menunjukkan setiap warga Negara mempunyai peran dan kedudukan penting dalam kehidupan politik di Negaranya.

Gabriel A Almond (Sitepu 2012:101) membedakan partisipasi politik atas dua bentuk yaitu, 1). Partisipasi politik Konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern. 2). Partisipasi politik non-Konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan illegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional.

- 1) Partisipasi Politik Konvensional
 - a) Pemberian suara atau voting
 - b) Diskusi politik
 - c) Kegiatan kampanye
 - d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
 - e) Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative

- 2) Partisipasi Politik non-konvensional
 - a) Pengajuan petisi
 - b) Berdemonstrasi
 - c) Konfrontasi
 - d) Mogok
 - e) Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (pengerusakan, pemboman, pembakaran)
 - f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
 - g) Perang gerilya dan revolusi

Menurut Michael Rush & Philip Althoff (Sitepu 2012:100) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi
- c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik
- d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik
- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
- f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal
- i. Partisipasi dalam pengumuman suara

Partisipasi politik sebenarnya merupakan suatu konsep yang sudah populer dalam ilmu politik, namun demikian penggunaannya sering bermacam-macam sehingga menimbulkan pemahaman konsep yang berbeda-beda. Sekalipun demikian, sebagian besar ilmu politik bersepakat bahwa yang dimaksudkan dengan partisipasi politik itu adalah bagaimana keterlibatan

masyarakat atau rakyat banyak didalam kegiatan-kegiatan politik (Sitepu 2012: 92).

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (Yoyoh Rohania & Efriza 2015: 488) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

- a. *Kegiatan pemilihan* dengan mencangkup suara akan tetapi juga sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, dengan mencari dukungan dibagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- b. *Lobbying* merupakan dengan mencangkup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin politik dengan maksud untuk memengaruhi keputusan tentang persoalan yang telah menyangkut sejumlah besar.
- c. *Kegiatan organisasi* dengan merupakan menyangkut partisipasi sebagai pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah dengan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. *Mencari koneksi* dengan merupakan tindakan perorangan yang akan ditunjukkan terhadap pejabat pemerintah dan dengan memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e. *Tindakan kekerasan* merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik dan untuk keperluan analisis dan manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai bentuk kategori tersendiri dengan sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang ataupun harta benda.

Menurut Dedi Irwan (Yoyoh Rohania & Efriza 2015:495) bentuk partisipasi politik terbagi menjadi empat, yaitu :

1. "diukur" dengan "alat ukur"-nya adalah skala waktu priodesasi
2. Kampanye Politik, adalah kegiatan politik yang bertujuan memengaruhi orang atau kelompok lain tersebut mengikuti kegiatan politik pihak yang berkampanye (dalam kegiatan khusus, misalnya pemilu)
3. Aktivits Group, kegiatan politik yang digerakan secara sistematis
4. Kontak Politik (*lobby politik*), kegiatan politik yang biasanya yang dilakukan oleh individu-individu untuk melakukan komunikasi politik kepada pemimpin parpol (atau elit politik).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli tentang partisipasi politik, dapat disimpulkan partisipasi politik adalah suatu bentuk keterlibatan baik individu atau kelompok dalam suatu masyarakat didalam ruang lingkup kegiatan-kegiatan politik.

Pemilih Pemula

Menurut Adman Nursal (Bakti, 2012;129) mengatakan bahwa pemilih pemula atau pemilih muda setidaknya memiliki dua makna penting:

1. Menjadi medan perebutan suara dalam pemilu.

2. Sekmen ini menjadi penentu ramai tidaknya rapat umum partai politik yang memiliki makna penting untuk publikasi maupun mempengaruhi calon pemilih lainnya.

Secara umum (Bakti 2012;130). Pengetahuan politik pemilih pemula sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok pemilih yang lainnya. Namun, preferensi mereka seringkali dinilai baru pada tahap penerimaan (aksestabilitas) dan belum sampai pilihan politik (elektabilitas). Mereka seringkali digambarkan sebagainya:

- a. Pemilih yang masih labil dan cenderung apatis
- b. Pemilih yang memiliki pengetahuan politik yang relatif rendah
- c. Pemilih yang cenderung didominasi oleh kelompok (peer group)
- d. Pemilih yang melakukan pilihan karena aspek popularitas partai politik atau calon yang diusulkan partai politik
- e. Pemilih yang datang ketempat pemungutan suara (TPS) hanya sekedar untuk membatalkan atau menggugurkan haknya.

Namun, terlepas dari gambaran tersebut, keinginan mereka dalam berpartisipasi saat memberikan suara pada penyelenggaraan pemilu merupakan potensi yang cukup signifikan. Selain besarnya jumlah pemilih pemula, potensi untuk memperoleh suaranya mereka dapat dilihat dari antusiasmenya dalam mengikuti pemilu pertama kali.

Menurut Nur Budi Hariyanto (Bakti 2012:127) merupakan potensi signifikan bagi kontestan pemilihan umum (pemilu) untuk mendulang suara untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam politik. Karena itu, hanya dieksploitasi untuk kepentingan politik, namun terlihat aktif dalam tatanan demokrasi.

Menurut Imam Gusnaldi dalam (Anugraha 2013:8) didalam pemilu terdapat 3 cara untuk membaca perilaku pemilih menurut usia yaitu:

1. *Pemilih Pemula (17-21 Tahun) Rata-rata terdiri dari 20-30 persen pemilih.*

Pemilih pemula tidak memiliki kepedulian untuk memilih akan tetapi mudah dipengaruhi. Tidak untuk diarahkan memilih akan tetapi mudah diarahkan untuk provokasi, bertindak anarkis bahkan merusak suasana lingkungannya serta dapat mempengaruhi kebijakan. Secara psikologis pemilih pemula suka ramai-ramai sehingga yang dapat mempengaruhi mereka untuk memilih adalah mereka yang dianggap tokoh dan idola (artis, orang tua, dll) dikarenakan minimnya pendidikan politik dan begitu banyaknya beban pendidikan yang harus dikerjakan.

2. *Pemilih Dewasa (21-50 Tahun) Rata-rata terdiri dari 30-40 persen pemilih.*

Pemilih dewasa lebih cenderung dan sejalan ketidakpercayaan mereka terhadap perubahan yang selalu tidak menampakan perbaikan setelah proses pemilu. Pemilih dewasa cenderung lebih dewasa dalam memberi perbedaan yakni dari perbedaan pendapat. Mereka pemilik massa pemilih dalam konteks

politik tidak bertuan alias mengambang. Mereka cenderung terikat pada hubungan emosional dengan ideology tertentu. Dengan begitu pemilih dewasa harapan mendapatkan suara melalui pilihan yang didasarkan pada ikatan emosional terhadap ideology atau komunitas tertentu menjadi sangat terbuka.

3. Pemilih Orang Tua (50 Tahun ke atas) Rata-rata terdiri dari 10- 20 persen pemilih.

Mereka yang tidak banyak lagi mendapatkan pengetahuan politik dan bahkan tidak tahu pemimpin dan kepemimpinan karena usianya. Sehingga mereka kurang menilai segala penyelewengan, padahal partai/figure yang didukungnya melakukan apa saja yang sewenang-wenang. Karena usia mereka tidak dapat menegur atau memperbaiki kesalahan-kesalahan figure/partai, karena mereka lebih cenderung pasrah. Dan akhirnya pemilih Tua akan mudah diarahkan untuk tujuan suara atau memilih.

Dari definisi dan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan ciri-ciri pemilih pemula yaitu

- a. Warga Negara Indonesia yang telah genap usia 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin
- b. Baru pertama kali mengikuti pemilihan umum (memberikan hak suara) sejak pemilu diselenggarakan
- c. Mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT pemilu 2018

Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut PILKADA atau pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang antara lain Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan wakil Walikota untuk Kota.

Menurut Sudiharto (Yoyoh Rohania & Efriza 2015:440) mengatakan pemilu adalah sarana penting dalam Demokrasi, karena pemilu merupakan contoh partisipasi rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyak jumlah warga Negara, sehingga mereka harus menunjukan wakil untuk kehidupan Negara.

Menurut Gaffar (2012 :85) menyatakan bahwa melalui pemilukada masyarakat dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandate seorang Kepala Daerah, juga apakah organisasi politik penopang masih dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu sebagai bagian dari pemilu, pilkada harus dilakukan secara demokrasi sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut.

Paiman Napitupulu (Yoyoooh Rohaniah & Efriza, 2015:439) pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin Negara atau pemimpin pemerintahan. Seluruh

rakyat untuk menjadi pemimpin mereka, ini semua merupakan proses pemilu. Jadi melalui pemilu rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan.

Pengertian lain tentang Pilkada adalah pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Web *Wikipedia* (Yoyooh Rohaniah & Efriza, 2015:440) pemilu merupakan proses yang mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan yang beraneka ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat dipelbagai tingkat pemerintahan, sampai Kepala Desa.

Menurut (Rahmat 2015 :36) penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung selalu saja rawan timbul masalah. Baik masalah yang timbul pada saat persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, bahkan pada saat selesai pemilihan. Masalah-masalah yang timbul tersebut cukup beragam seperti:

1. Masalah kesalahan dalam akurasi daftar pemilih tetap
2. Masalah dalam penggunaan anggaran dan fasilitas Negara terutama oleh *incumbent*
3. Praktik kampanye negative
4. Masih banyak pelanggaran terhadap netralitas bagi PNS
5. Praktik politik uang
6. Mencuri start kampanye
7. Manipulasi hasil perhitungan suara
8. Terbatasnya jumlah saksi-saksi
9. Keberpihakan KPUD dan atau Banwaslu kepada salah satu calon, serta
10. Sosialisasi pemerintah dan KPUD yang belum maksimal

Pilihan untuk tetap melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung mendapat dukungan dari banyak kalangan, baik dari kalangan politikus, pemerintah, akademis, pengamat dan masyarakat lainnya.

Selanjutnya (Rahmat 2015 :13) pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi fenomena yang sangat menarik untuk diulas. Kehebohan-kehebohan dalam penyelenggaraan pilkada menjadi suatu kelasiman yang terjadi tanpa disadari oleh semua pihak. Masyarakat sibuk dengan dukungan untuk memenangkan pasangan calon Kepala Daerah yang mereka usung. Kemudian deratnya spanduk dan baliho pasangan calon Kepala Daerah disepanjang jalan dan fasilitas umum menjadi pandangan biasa.

Menurut Gaffar (2012:85) pemilukada memiliki 3 fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yaitu:

1. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat daerah.
2. Melalui pemilihan umum Kepala Daerah diharapkan pilihan masyarakat didaerah didasarkan pada Visi, Misi program serta

kualitas dan integritas calon Kepala Daerah yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

3. Pemilihan umum Kepala Daerah merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang.

Dari beberapa pendapat para ahli, maka pemilihan Kepala Daerah sangat penting, karena masyarakat adalah objek Demokrasi yang dapat menentukan serta peluang yang besar untuk memilih pemimpin yang ada di daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang diselenggarakan oleh KPU Daerah berdasarkan asas umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan tentunya tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian adalah Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Studi di Kecamatan Langowan Timur). Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, dan salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia yang lebih demokratis.

Untuk membentuk kehidupan yang demokrasi pada masyarakat sekaligus menambah pengetahuan tentang politik terutama bagi pemilih pemula yang ada di Kecamatan Langowan Timur, maka Kabupaten Minahasa telah melaksanakan pemilihan umum pada tanggal 27 juni 2018 dan telah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung berdasarkan amanat perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan deskripsi tentang keadaan pemilukada di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.

1. Pasangan Calon dan Asal Partai

Setelah melakukan berbagai penyeleksian maka diputuskan ada dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan tahun 2018 di Kabupaten Minahasa yang telah ditetapkan oleh KPUD sesuai dengan nomor urut, yang dapat dilihat pada table di bawah ini:

NO	NAMA PASANGAN	KETERANGAN	PARTAI PENGUSUNG
-----------	----------------------	-------------------	-------------------------

CALON			
1	Ivan Steven Sarundajang Cariég Nachel Runtu	Calon Bupati Calon Wakil Bupati	Golkar NASDEM & PKPI
2	Royke Octavian Roring Robby Dondokambey	Calon Bupati Calon Wakil Bupati	PDIP DEMOKRAT, GERINDRA & HANURA

2. Jumlah Partisipasi Politik

Jumlah dari masyarakat Kabupaten Minahasa yang terdaftar sebagai pemilih tetap dan telah berpartisipasi dalam pemilihan umum di TPS setempat berjumlah 203.052 suara sah, dari jumlah keseluruhan 2 pasangan calon, suara tidak sah berjumlah 2.106 suara, jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah berjumlah 205.158 suara.

Berikut ini merupakan gambaran partisipasi politik pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa, yang digambarkan dalam table di bawah ini:

Jumlah Suara	Pemilih Tetap		Jumlah
	L	P	
Daftar Pemilih Tetap	126.719	124.422	251.141
Pengguna Hak Pilih	99.730	98.995	198.725

3. Jumlah perolehan suara Kandidat Calon

Perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi KPUD Minahasa yang menempati suara terbanyak diperoleh pasangan calon nomor urut 2 yaitu Royke Octavian Roring dan Robby Dondokambey dengan perolehan suara sebanyak 132.152 suara, kemudian pasangan calon nomor urut 1 yaitu Ivan Steven Sarundajang dan Cariég Naichel Runtu dengan perolehan suara sebanyak 70.900 suara. Dari hasil tersebut, KPUD menetapkan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Royke Octavian Roring dan Robby Dondokambey memenangkan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa.

4. Jumlah TPS, Pemilih dan Pemilih Pemula di Kecamatan Langowan Timur

Jumlah warga di Kecamatan Langowan Timur yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada pemilukada tahun 2018 berjumlah 10.129 orang. Dengan jumlah laki-laki 5.062, dan jumlah perempuan 5.067 orang. Sedangkan jumlah pemilih pemula sendiri yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada pemilukada tahun 2018 berjumlah 247 orang dengan jumlah laki-laki 119 orang dan perempuan 128 orang yang terbagi dalam 21 TPS.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2018

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan wahana menyalurkan segala aspirasi masyarakat. Dengan adanya pemilihan Kepala Daerah setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat memmanifestasikan kehendak mereka secara sukarela tanpa pengaruh dari siapapun.

Dalam hal ini setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan secara aktif, dalam menghadiri kegiatan-kegiatan politiknya, seperti kampanye. Namun keaktifan anggota masyarakat baik dalam memberikan suara maupun kegiatan kampanye tentu harus didorong oleh sikap orientasi yang begitu tinggi. Kesadaran dan motivasi warga masyarakat dalam kegiatan politik sangat penting untuk menopang tingkat partisipasi politik terhadap pemilihan Kepala Daerah.

Partisipasi politik seseorang tentunya tampak dilihat dari aktivitas-aktivitas politik yang mereka lakukan baik secara konvensional maupun non-konvensional, begitu pula dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Langowan Timur terutama bagi pemilih pemula, ada berbagai macam kegiatan atau aktivitas politik yang mereka lakukan menjelang dan pada saat hari H pemungutan suara pemilukada di Kabupaten Minahasa Tahun 2018.

Miriam Budiarjo (Anwar Arifin 2015:7) mengatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin Negara, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan public (*public policy*). Kegiatan ini mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Dalam demokrasi, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih atau ditentukan sendiri oleh rakyat dan untuk menentukan siapa yang berwenang untuk mewakili rakyat, maka diadakan pemilihan umum.

Pemilih pemula yang sebelumnya hanya menjadi penonton proses politik pemilihan Kepala Daerah, kini mereka telah menjadi bagian dari proses penentuan calon, dan kini mereka akan menjadi pelaku atau pemilih yang akan menentukan terpilihnya seorang Kepala Daerah yang akan memajukan daerahnya.

Pemilihan umum Kepala Daerah ini juga merupakan sarana perwujudan partisipasi politik rakyat. Partisipasi politik itu sendiri dapat dijabarkan melalui aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan oleh masyarakat seperti pengumuman suara untuk memilih wakil rakyat ataupun Kepala Negara, itu merupakan bentuk yang paling mudah kita kenali.

Pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2018 merupakan rangkaian pesta demokrasi rakyat Indonesia. Oleh karena itu tidak heran kalau masyarakat yang ada di Kecamatan Langowan Timur begitu antusias dalam menyukkseskan pesta demokrasi tersebut tidak terkecuali dari kalangan pemilih pemula. Pemilih pemula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga mempunyai

bagian yang penting dalam suksesnya pemilukada secara langsung. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh para pemilih pemula tidak berbeda dengan aktivitas masyarakat yang lain.

Hal tersebut dapat dilihat dari wawancara dengan informan-informan yang menunjukkan semua informan yang diwawancarai oleh peneliti menggunakan hak pilihnya pada pemilukada tahun 2018. Mereka melakukan dengan berbagai alasan, antara lain karena kesadaran politik sebagai warga Negara yang baik, karena penilaian mereka terhadap pasangan calon dan ada juga karena pemilukada 2018 merupakan pengalaman pertama bagi mereka dalam memilih.

Dalam hal ini hasil wawancara yang perlu diperhatikan adalah pemberian suara oleh pemilih pemula karena mereka memilih dan menentukan pilihan belum sepenuhnya berdasarkan hati nurani tapi ternyata masih terpengaruh dari pilihan keluarga maupun kerabat terdekat. Hal ini seperti yang dilakukan oleh informan F.M (18 Tahun) Desa Waleure TPS 2 mengatakan bahwa:

“bagi informan itu sangat berpengaruh ketika dalam proses pemilihan semakin dekat tanggal pemilihan yang sudah di tetapkan semakin gugup untuk informan menentukan pilihan informan, dan ketika orang tua informan mulai menceritakan pasangan mana yang harus dipilih maka informan harus mengikuti mereka, seperti misalnya mereka memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 otomatis informan harus memilih pasangan calon Nomor 1 juga”.

Selanjutnya partisipasi politik yang dilakukan adalah kegiatan kampanye. Yang ditemui peneliti disini sesuai hasil wawancara adalah pemilih pemula di Kecamatan Langowan Timur ada yang mengikuti kampanye dan ada juga yang tidak mengikuti. Bagi mereka tidak mengikuti mereka beranggapan bahwa kampanye hanya sekedar untuk bersenang-senang saja dan menghabiskan waktu saja dan bagi yang mengikuti kampanye beralasan kalau mengikuti kampanye hanya ikut-ikutan dengan teman-teman yang lain untuk melihat keramaian yang ada. Dari alasan tersebut nampaknya belum semua pemilih pemula di Kecamatan Langowan Timur yang mengikuti kampanye dengan motivasi yang benar. Tujuan kampanye sendiri adalah untuk memaparkan visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, jika mereka terpilih nanti akan membuktikan bahwa kinerja mereka akan lebih baik dari apa yang sebelumnya dilakukan, dan akan mengubah menjadi lebih baik.

Pemberian Suara

Pemahaman arti demokrasi yang makin luas di kalangan masyarakat memberikan pengaruh yang berarti bagi dinamika politik bangsa. Salah satu indikator berjalannya politik secara demokratis adalah adanya partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Untuk mengukur hal itu, kita biasa mengamati bentuk-bentuk partisipasi politik yang ada dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat kita, selalu ada perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindari. Demikian juga dalam bidang politik, tentunya masing-masing individu memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda-beda dalam melihat persoalan.

Pemilih pemula di Kecamatan Langowan Timur belum sepenuhnya secara sadar dan mandiri melakukan kegiatan politiknya. Mereka memilih karena merasa memilih adalah kewajiban yang harus dilakukan karena mendapat undangan dari pihak desa. Selain itu pemilih pemula melakukan pemberian suara hanya berdasarkan ingin memilih saja karena para pemilih pemula di Kecamatan Langowan Timur tidak mau melewatkan proses pemberian suara karena pemilih pemula di Kecamatan Langowan Timur ingin merasakan memilih wakilnya secara langsung.

Berkaitan dengan pilukada tahun 2018, warga masyarakat yang ada di Kecamatan Langowan Timur begitu antusias untuk menyalurkan hak pilih mereka begitupun dengan kalangan pemilih pemula yang begitu antusias untuk ikut memilih karena sebagian besar pemilih pemula mereka sangat ingin berpartisipasi dalam pilukada tahun 2018, bahkan dari mereka pemilih pemula saling mengajak satu sama lain untuk berbondong-bondong pergi ke TPS. karena bagi mereka adalah pengalaman pertama untuk memilih dan mereka tidak mau melewatkan momen tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari informan M.W (17 tahun) Desa Waleure TPS 2 mengatakan bahwa:

“Hari-hari sebelum pilukada informan mulai tak sabar untuk menanti tanggal yang sudah ditentukan oleh KPU yang ada, karena di tahun ini adalah pengalaman pertama informan untuk ikut memilih Bupati dan Wakil Bupati yang ada di Kabupaten Minahasa, untuk itu informan sangat tertarik sekali untuk berpartisipasi dalam pilukada di tahun ini”.

Bahkan ada juga pemilih pemula yang sadar bahwa dengan ikut berpartisipasi dalam pemilu lewat pemberian hak suara secara tidak langsung dia telah berbuat hal yang positif bagi bangsa ini dan memberikan hak suara adalah suatu hal yang mencerminkan sikap warga Negara yang baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh informan F.M (18 Tahun) Desa Waleure TPS 2 mengatakan bahwa:

“Ketika informan sudah mengikuti pemilihan umum untuk menentukan pemimpin di Kabupaten Minahasa, informan mulai mengetahui bahwa keikutsertaan dalam memilih itu adalah satu hal yang penting yang dapat mencerminkan sikap sebagai seorang warga masyarakat Indonesia yang baik dan benar”.

Pemilih pemula di Kecamatan Langowan Timur, secara sadar melakukan kegiatan politiknya. Mereka memilih, karena kegiatan memilih adalah kewajiban yang harus wajib dilakukan karena mendapatkan undangan dari pihak penyelenggara. Meskipun sebagian pemilih pemula melakukan dengan hanya sekedar ikut-ikutan memilih saja, namun hal ini tidak dilewatkan bagi para pemilih pemula yang merasa bahwa mereka akan memilih Wakil rakyat secara langsung.

Sejalan dengan pendapat dari informan A.M (18 tahun) Desa Amongena I TPS1.

“informan merasa senang pada saat kegiatan proses menjalankan undangan dari pihak yang bersangkutan, informan mendapatkan undangan dan pada saat itu informan berkata kepada orang tua informan bahwa kali ini informan mendapatkan undangan untuk memilih, karena pada tahun-tahun kemarin informan tidak mendapatkan undangan karena umur yang belum cukup untuk memilih, dan saat inilah waktu informan untuk memilih Wakil rakyat yang pertama kalinya”.

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya kita memiliki perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindari. Berbeda suku, dan agama adalah sesuatu hal yang biasa. Berbeda pilihan dalam menentukan calon kepala daerah pun harus disikapi dengan kedewasaan berpolitik, tidak dapat dipungkiri sering terjadi gesekan-gesekan ditengah masyarakat disaat menjelang pemilu. Ketika orang lain memiliki pilihan berbeda dengan kita, seringkali masyarakat orang yang berbeda pilihan itu adalah lawan. Pemikiran seperti inilah yang sering ditemui dalam suasana menjelang pemilu, dan pola pikir seperti itu adalah tidak benar dan harus diubah tentunya dengan sikap kedewasaan berpolitik kita.

Menentukan pilihan untuk memilih pasangan calon kepala daerah tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Tidak hanya bagi mereka yang telah beberapa kali mengikuti pemilihan umum, bagi kalangan pemilih pemula pun dalam menentukan pilihan mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapat dari informan T.L (19 Tahun) Desa Waleure TPS 2 yang memilih berdasarkan faktor keluarga.

“informan mendukung calon Bupati dan Wakil Bupati karena mengikuti keluarga informan. Karena calon Bupati Wakil Bupati adalah bagian dari keluarga informan, oleh sebab itu informan harus memilih sama dengan pilihan keluarga informan”.

Selain itu ada pemilih pemula yang menentukan pilihan mereka karena salah satu calon kepala daerah sangat rama kepada semua orang terlebih dengan anak-anak muda.

Sejalan dengan pernyataan dari informan A.M (18 tahun) Desa Amongena I TPS 1.

“informan memilih sesuai dengan hati nuraini dan tanpa paksaan dari siapapun, informan menentukan pilihan pada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati karena dia sangat ramah kepada semua orang, bahkan dapat merangkul anak-anak muda yang ada”.

Sebagian pemilih pemula tidak tau siapa yang harus dipilih karena belum tau persis perkembangan dari setiap kandidat calon. Hal ini disampaikan oleh informan Z.R (18 tahun) Desa Amongena I TPS 4.

“informan sebenarnya tidak tau siapa yang bagus nuntuk jadi Bupati dan Wakil Bupati. Namun ada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati yang informan pilih karena informan mendapatkan uang”.

Sejalan dengan pendapat yang dikatakan oleh informan F.M (18 Tahun) Desa Waleure TPS 2 mengatakan bahwa:

“Dalam pemberian suara di TPS untuk memilih kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati sama seperti dengan mama dan papa informan”.

Menentukan pilihan pada salah satu calon kepala daerah yang bertarung dalam pemilukada tahun 2018 tidak terlepas dari faktor-faktor yang dikemukakan diatas. Baik masyarakat umum maupun pemilih pemula, setiap pilihan yang mereka ambil ditentukan mulai dari faktor keluarga, teman, kerabat dekat, dan sesuai hati nurani serta penilaian pribadi dari pemilih itu sendiri. Apapun yang menjadi alasan mereka untuk memilih, yang pasti sebagian besar pemilih pemula yang ada di Kecamatan Langowan Timur telah berpartisipasi untuk pertama kalinya pada pemilukada tahun 2018.

Diskusi Politik

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati merupakan acara lima tahunan yang diselenggarakan oleh Negara guna melaksanakan amanat konstistusi. Media masa maupun layar televisi setiap hari membicarakan hal ini, pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 ini pemilih pemula di Kecamatan Langowan Timur secara umum belum begitu banyak yang mebicarakan mengenai masalah pemilu dengan teman-temannya maupun anggota masyarakat yang lain hal ini dikarenakan belum begitu memikirkan pentingnya sebuah pemilu bagi kelangsungan demokrasi Negara, namun sebagian dari pemilih pemula di Kecamatan Langowan Timur juga sering membicarakan masalah mengenai pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 ini dengan teman-temannya di sela-sela kegiatannya sehari-hari. Membicarakan masalah politik biasanya dilakukan di berbagai tempat seperti disekolah dan pembicaraan dilakukan dengan teman-teman dekat mereka, baik membicarakan hal-hal positif maupun negatif. Seperti yang di katakan oleh informan T.L (19 Tahun) Desa Waleure TPS 2 bahwa:

“ketika informan dan teman-teman informan berkumpul di satu tempat kami sering membicarakan masalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bahkan dalam pembicaraan kami sering berdebat masalah calon yang ada, yang wibawanya tidak pantas untuk menjadi pemimpin karena dari cara pendekatan bahkan kinerja untuk menjadi seorang pemimpin tidak pantas, karena begitu banyak masalah-masalah yang didapati dan tidak patut dicontohi”.

Bahkan adapun anggapan dari para pemilih pemula mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang nantinya akan terpilih menjadi pemimpin di Kabupaten Minahasa yang terbaik bukan yang terburuk yang sifat dan karakternya tidak pantas untuk dicontohi oleh masyarakat yang ada. Seperti yang di katakan oleh informan R.R (17 Tahun) Desa Waleure TPS 3 bahwa :

“Ketika dalam masa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ada di Kabupaten Minahasa saat-saat itu sangat menegangkan karena dimana-mana terjadi perdebatan antara pendukung yang satu dengan yang lain, bahkan sayapun terlibat didalamnya, pada saat informan bertemu dengan teman-teman informan dan mulai membicarakan hal itu informan pun

mulai mempertahankan calon yang informan pilih dengan calon yang mereka pilih karena dilihat dari pendekatan calon yang nantinya informan akan pilih lebih baik daripada calon yang mereka pilih”.

Pada pemilihan ini, pemilih pemula di Kecamatan Langowan Timur sering membicarakan masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa politik menjelang pemilukada dengan teman-teman yang ada disekitar mereka, disela-sela kegiatan sehari-hari ketika mereka bertemu mereka membicarakan masalah politik bahkan ada yang saling menjatuhkan pasangan calon yang satu dan yang lain, untuk mempertahankan apa yang menjadi pilihan mereka masing-masing. Seperti pernyataan dari informan F.M (18 Tahun) Desa Waleure TPS 2 bahwa:

“sangat sering bahkan seringkali terjadi perdebatan antara informan dan teman-teman, tentang membela dan menjatuhkan pasangan calon yang satu dan dengan yang lain”.

Sama seperti pendapat dari informan A.T (19 tahun) Desa Waleure TPS 2.

“ya sering informan dan teman-teman membicarakan karena pilkada tahun ini sangat menegangkan dan sangat seru untuk dibicarakan”.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 menjadi tempat yang istimewa bagi para pemilih pemula sejalan dengan pernyataan diatas yang menyatakan bahwa pemilih pemula di Kecamatan Langowan Timur sering membicarakan bahkan mendiskusikan tentang masalah pemilukada dengan teman-teman mereka. Sejalan dengan pernyataan dari informan F.W (18 Tahun) Desa Amongena I TPS 2.

“Dalam masa pemilihan informan merasa sangat senang karena bukan hanya soal memilih atau mencoblos pasangan calon yang ada, bahkan sayapun merasa bahwa wawasan informan mulai terbuka ketika didalamnya ada perdebatan yang sangat hebat untuk mempertahankan calon masing-masing”.

Adapun kegiatan politik yang dilihat dari aktivitas-aktivitas politik secara Konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang Normal dalam demokrasi modern dan bentuk partisipasi politik secara Non Konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Hal ini sama dengan pendapat yang di katakan oleh informan A.B (18 Tahun) Desa Amongena I TPS 1 bahwa dilihat dari aktivitas politik secara Konvensional.

“Dalam masa kampanye informan dan teman-teman membicarakan masalah politik-politik yang ada yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, lewat pemberian suara, diskusi dalam bidang politik, bahkan dalam kegiatan kampanye. Akan ada persaingan yang akan muncul antara pasangan calon yang satu dengan pasangan calon yang lain yang didalamnya akan memakan banyak biaya”.

Sejalan jugsan dengan pendapat dari informan E.M (17 Tahun) Desa Amongena I TPS 1 yang dilihat dari aktivitas politik secara Non Konvensional.

“Ketika informan dan teman dekat informan merunding masalah saat kegiatan pilkada pada tahun ini, kami merasa akan terjadi suatu perkelahian antara pendukung calon yang satu dengan calon yang lain karena melihat dari sisi fisiknya ada kekerasan dan ancaman yang akan terjadi didalamnya, dan setelah masa kampanye ternyata apa yang kami duga ternyata terjadi dan ada beberapa orang yang terluka akibat ketidak tahanan emosinya”.

Kegiatan Kampanye

Kampanye pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah kegiatan organisasi peserta pemilu yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia untuk mempengaruhi pemilih dalam rangka usaha memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati. Kampanye adalah salah satu bagian yang penting dalam kegiatan pemilu. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh para calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menarik simpati masyarakat seperti konvoi, mengundang artis, panggung terbuka, serta pemberian bantuan pembangunan tempat-tempat umum seperti digereja-gereja. Anggapan Pemilih pemula Kecamatan Langowan Timur bahwa kampanye merupakan sesuatu kegiatan yang menyita waktu yang banyak dan harus mengalahkannya segala rutinitas dan kegiatan mereka sehari-hari mengakibatkan para pemilih pemula enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye. Pemilih pemula yang lain beranggapan bahwa kegiatan kampanye merupakan kegiatan yang menyenangkan karena mereka mendapat hiburan selain itu juga mereka dapat memberikan dukungannya kepada calon Bupati dan Wakil Bupati yang mereka dukung.

Sehingga hal-hal tersebut menarik perhatian bagi para pemilih khususnya pemilih pemula untuk memilih calon Kepala Daerah.

“Dalam masa kampanye peneliti sering mengikuti konvoi dengan para pendukung pasangan calon, karena peneliti senang dengan keramaian bahkan dalam masa kampanye pun ada kedatangan Artis dan disitulah peneliti dan teman-teman peneliti ikut bernyanyi bahkan bergoyang dalam kegiatan kampanye, dan suasanapun semakin ramai”.

Anggapan pemilih pemula bahwa kampanye adalah kegiatan yang menyenangkan dalam pemilihan umum. Meskipun mereka sudah mengetahui kegiatan kampanye namun ada juga pemilih pemula tidak mengikuti kampanye karena mereka lebih mementingkan sekolah mereka. Seperti yang dikatakan oleh informan A.M (18 tahun) Desa Amongena I TPS 1.

“pada saat masa kampanye informan tidak pernah mengikuti meskipun saya melihat teman-teman informan mengikuti kampanye informan sama sekali tidak berkeinginan untuk mengikuti kampanye karena bagi informan itu hanya menghabiskan waktu saja, lebih baik informan ke sekolah untuk menambang ilmu”.

Namun ada juga pemilih pemula mengikuti kampanye dengan alasan bahwa kampanye merupakan sesuatu untuk bersenang-senang dan berkumpul

dengan teman-teman. Sesuai dengan pernyataan dari informan D.L (18 tahun) Desa Waleure TPS 2.

“informan mengikuti kampanye, karena informan melihat teman-teman mengikuti maka informan juga mengikuti dan ingin melihat keramaian yang ada, berkumpul bersama dengan teman-teman”.

Seperti pernyataan dari informan F.W (18 Tahun) Desa Amongena I TPS 2 kalau mengikuti kampanye informan dapat bersenang-senang dengan teman-teman dan meninggalkan pekerjaan rumah.

“informan mengikuti kampanye karena melihat teman-teman saya yang sudah keliaran di jalan untuk menunggu kendaraan yang akan di pakai untuk menuju ke tempat kegiatan kampanye dan kelihatannya sangat ramai, maka informan dengan cepatnya mempersiapkan diri untuk ikut bersama-sama dengan teman-teman, karena informan juga senang dengan keramaian dan selain itu informan bebas dengan pekerjaan yang ada di rumah”.

Namun ada juga anggapan dari para pemilih pemula tentang kampanye, yang didalamnya mereka ingin mengetahui bagaimana pemaparan Visi Misi dari berbagai calon yang ada. Hal ini sependapat dengan informan J.L (17 Tahun) Desa Amongena 1 TPS 1 mengatakan bahwa.

“Dalam masa kegiatan kampanye informan mengajak teman informan untuk mengikuti kampanye terbuka, dengan maksud untuk mengetahui bagaimana pemaparan Visi Misi dari calon tersebut, agar ketika mereka terpilih nanti kita sudah mengetahui program-program yang ada yang dapat menjadikan lebih baik dan membawa perubahan”.

Selanjutnya sejalan dengan pendapat yang dikatakan oleh informan A.P (18 Tahun) Desa Waleure TPS 1 bahwa:

“Pada saat masa kampanye terbuka informan mengikuti dua-duanya dan ternyata didalamnya ada persamaan yang tak cukup jauh untuk dapat menyalurkan inspirasi dari pada masyarakat, namun ada juga keburukan yang terdapat didalamnya soal pemaparan visi misi”.

Pendapat dari beberapa orang pemilih pemula tersebut menggambarkan bahwa pemilih pemula di Kecamatan Langowan Timur belum ada keterkaitan dan kesadaran secara penuh dalam kegiatan kampanye meskipun sudah mengetahui tujuan kampanye tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Langowan Timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 sudah memiliki peningkatan, dalam hal ini dilihat dari kehadiran pemilih pemula dalam pemberian suara hampir semua yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya di TPS. Bahkan bukan hanya memilih namun mereka

juga mengikuti kegiatan-kegiatan politik yang ada. Peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Dalam pemberian suara pemilih pemula di Kecamatan Langowan Timur yang begitu antusias untuk berpartisipasi dalam pemberian hak suara secara langsung, walaupun dalam mereka mengambil keputusan dalam memilih yang hanya sekedar ikut-ikutan dengan pihak keluarga maupun teman-teman terdekat, namun mereka tidak mau melewatkan momen yang ada karena bagi mereka ini adalah pengalaman pertama untuk memilih dan bahwa faktor keluargalah yang ternyata lebih menonjol dari pemberian suara..
2. Pemilih pemula di Kecamatan Langowan Timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mereka sering membicarakan masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa politik menjelang pemilukada dengan teman-teman yang ada disekitar mereka, dan hal itulah terlihat bahwa pemilih pemula di Kecamatan Langowan Timur mulai aktif dalam berdiskusi mengenai masalah politik, kampanye dan pemberian suara.
3. Partisipasi politik pemilih pemula tidak hanya memberikan suara dalam pemilukada. Pemilih pemula di Kecamatan Langowan Timur juga ikut berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum seperti kampanye atas keinginan sendiri maupun diajak oleh orang terdekat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian mengenai partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat beberapa kesalahan serta ketidak sesuaian dalam proses pemilukada untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemilih pemula hendaknya lebih membuka diri dan lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan politik, karena dengan begitu pemilih pemula dapat menambah wawasan tentang politik dan menjadi sarana pembelajaran tersendiri selain belajar disekolah dan dikampus.
2. Partai politik agar lebih aktif dalam mengadakan pendidikan politik secara langsung dengan masyarakat terlebih pemilih pemula sehingga dapat mendengar aspirasi mereka, dan juga visi misi, dan program dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat.

DAFTAR BACAAN

- Adnan Nursal. 2012. *Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Arifin, A. 2015. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bakti, 2012. *Literasi Politik Dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta : Churia Press.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, M, J. 2012. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press.

- Moleong, I. J . 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Mz Holizon, R.2015. *Pilkada Penuh Euforia Miskin Makna*. Jakarta: Bestari.
- Rush, M. dan Phillip, A. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT RajaGrada Persada.
- Rohania, Y. dan Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik. Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: IntransPublishing.
- Rahmat Hollyzon MZ dan Sri Sundari 2015. *Pilkada; Penuh Euforia, Miskin Makna*, Jakarta: Bestari
- Samuel, P, H. dan Joan N. 2010 *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sinaga, R, S. 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sitepu, A, P. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wiratna Sujarweni 2014. *Metodelogi Penelitan Kualitatif*. Yogyakarta: PB Pustaka BaruPers.

Sumber-sumber Lain

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah